

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penetapan pedoman sistem dan prosedur, norma, konsep, definisi, standarisasi, dan ukuran-ukuran.	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.
	2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	1. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik daerah.	1. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota.	1. —
	3. Fasilitasi dan pembinaan	1. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik daerah.	1. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota.	1. —
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi:	1. Penyelenggaraan statistik dasar meliputi:	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala provinsi:	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota:
	a. Sensus	a. Sensus penduduk (akhiran angka nol).	a. —	a. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	b. Survei Antar Sensus	b. Sensus pertanian (akhiran angka tiga). c. Sensus ekonomi (akhiran angka enam). 1. Penyelenggaraan survei antar sensus: a. Survei penduduk antar sensus (akhiran angka lima). b. Survei pertanian antar sensus (akhiran angka delapan). c. Survei ekonomi antar sensus (akhiran angka satu).	b. — c. — 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi: a. — b. — c. —	b. — c. — 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten/kota: a. — b. — c. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. Survei Berskala Nasional</p> <p>d. Survei Sosial dan Ekonomi</p>	<p>1. Penyelenggaraan survei berskala nasional:</p> <p>a. Survei-survei bidang ekonomi.</p> <p>b. Survei-survei bidang kesejahteraan rakyat.</p> <p>1. Penyelenggaraan survei sosial dan ekonomi:</p> <p>a. Survei-survei sosial dan ekonomi lain untuk memperoleh indikator-indikator sosial dan ekonomi.</p>	<p>1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat:</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:</p> <p>a. —</p>	<p>1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat:</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:</p> <p>a. —</p>
	<p>2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional</p>	<p>1. Penyelenggaraan statistik lintas sektor berskala nasional.</p>	<p>1. —</p>	<p>1. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Koordinasi statistik antar sektoral. 2. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral, provinsi dan kabupaten/kota.	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi. 2. —	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten/ kota. 2. —
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus.	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi.	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.